

ASN Pati Kembali Pakai Baju Adat



KR-Alwi Alaydrus

Pejabat dan ASN mengenakan pakaian adat Pati.

PATI (KR) - Pegawai di lingkungan Pemkab Pati kembali mengenakan baju adat khas Pati. Penggunaan baju adat khas Pati ini merupakan kali pertama 2022 setelah sempat terhenti sejak awal pandemi Covid-19, yakni Maret 2020 lalu. Penggunaan pakaian khas Pati, terlihat saat dilakukan upacara pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya untuk sejumlah ASN, Jumat (7/1). "Mengenakan pakaian khas Pati lagi, dimulai lagi, bulan Januari 2022, di minggu pertama pada hari Jumat setiap bulannya. Begitu juga pada bulan Februari, Maret dan seterusnya," kata Bupati Pati Haryanto.

Dikatakan penghentian mengenakan baju adat, karena terkendala lantaran banyaknya kegiatan penanganan Covid-19 seperti vaksinasi, monitoring PPKM dan aneka kegiatan di lapangan. "Pemberlakuan kembali penggunaan baju adat khas Pati, untuk mengenalkan dan mencintai budaya leluhur", jelas bupati Haryanto. Sementara itu, sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, PNS/ASN yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, mendapatkan tanda kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Salah satu pejabat yang menerima penghargaan adalah Sekda Pati Jumani, yang mendapatkan Satyalancana Karya Satya 30 tahun. (Cuk)-f

Naik Uang Sewa Lahan Tamansari Mal

SALATIGA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga pada awal tahun 2022 bakal menerima pembayaran uang sewa tahun ke-2 lahan Tamansari Mal sebesar Rp 1,445 miliar. Uang tersebut bakal masuk ke kas daerah sebagai pendapatan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Salatiga. Uang sewa ini berasal dari penyewa lahan Tamansari yang kini digunakan untuk Ramayana Mal, yakni PT Inti Griya Prima Sakti. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Salatiga, Muh Wahyudi Joko S, Jumat (7/1) membenarkan hal tersebut. Dijelaskan, sewa tahun pertama pada 2021 lalu, sebesar Rp 1.256.680.000, kemudian di tahun 2022 ini Pemkot Salatiga akan menerima uang sewa tahun kedua dari PT Inti Griya Prima Sakti untuk pendapatan ke kas daerah kurang lebih Rp 1.445.000.000. Jumlah di tahun kedua naik, karena dalam perjanjian antara Pemkot Salatiga dan PT Inti Griya Prima Sakti ada kenaikan inflasi sebesar 15 persen setiap tahunnya.

"Tahun 2022 ini akan menerima pembayaran sewa untuk tahun kedua kurang lebih Rp 1,445 miliar masuk ke kas daerah," jelas Wahyudi Joko S. Wahyudi mengungkapkan setelah dua waktu sewa tahun pertama habis ada Februari, pihaknya akan memberitahu kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban membayar sewa untuk tahun kedua 2022 ini. "Biasanya tanpa ditagih sudah membayar," katanya. Dikatakannya, aset lahan Tamansari Mal dari penghitungan set di buku catatan BKD dan belum dilakukan penyesuaian, yakni sebesar Rp 5.758.627.000.

Diketahui pada 2021 lalu diadakan perjanjian baru sewa selama 5 tahun sampai tahun 2026 oleh PT Inti Griya Prima Sakti, dengan nilai kurang lebih Rp 6,5 miliar dan dibayar per tahun. (Sus)-f

PTM di Kota Magelang Akhir Januari

MAGELANG (KR) - Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di wilayah Kota Magelang diperkirakan dilaksanakan di akhir Januari 2022. Palsnya, menunggu perkembangan Omicron, yang di beberapa kota positif rate-nya terjadi peningkatan. Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs Joko Budiyo MM usai mengikuti doa bersama Haul P Diponegoro ke-167 yang dilaksanakan di ruangan Museum P Diponegoro yang berada di kompleks bekas Kantor Karesidenan Kedu di Magelang, Jumat (7/1) malam. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Walikota Magelang Drs KHM Mansyur MAG.

Joko Budiyo menjelaskan kasus positif Covid-19 di Kota Magelang sejak beberapa hari terakhir ini tidak ada. Beberapa waktu lalu dikabarkan ada 1 orang, namun sekarang sudah sehat. Sebelumnya sempat menjalani isolasi di RSUD Budi Rahayu Kota Magelang. "Jadi nanti kalau ada yang terkonfirmasi, akan langsung kita isolasi. Langsung kita siapkan RSUD Budi Rahayu," katanya.

Berkaitan dengan kegiatan doa bersama Haul P Diponegoro ini, Joko Budiyo mengatakan kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan. Untuk tahun ini pelaksanaannya sederhana lantaran masih pandemi Covid-19. Selain untuk memperingati dari sisi sejarah P Diponegoro, juga untuk mendoakan P Diponegoro dan para pengikutnya. (Tha)-f



KR-Thoha

Wakil Walikota Magelang dan Sekda Kota Magelang saat berada di forum Haul P Diponegoro.

Pembangunan Gedung MPP Sukoharjo Selesai

SUKOHARJO (KR) - Penuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Sukoharjo akan segera diselesaikan secepatnya. Pemkab Sukoharjo berencana operasional MPP bisa dibuka mulai pertengahan tahun 2022 setelah pembangunan gedung sudah selesai hingga akhir 2021.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Sabtu (8/1) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah selesai membangun gedung MPP pada akhir 2021 lalu. Meski demikian gedung MPP belum bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat. Sebab kondisi sekarang baru sebatas menyelesaikan pembangunan gedung saja. Sedangkan kelengkapan sarana dan prasarana gedung

MPP belum terpenuhi.

Pemkab Sukoharjo pada tahun 2022 ini berencana akan segera melakukan pengisian kelengkapan sarana dan prasarana gedung MPP. Tahapan tersebut akan dilakukan pada awal hingga pertengahan tahun 2022. Kelengkapan yang akan dipenuhi seperti meja, kursi, komputer, jaringan internet, dan penunjang kerja lainnya. Penuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung MPP tersebut sedang dipersiapkan. Rencananya proses pengadaan akan dilakukan secepatnya. Pemkab Sukoharjo sendiri sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Pelayanan di gedung MPP kemungkinan baru buka pada per-

tengahan tahun 2022. Sebab sekarang saja menyelesaikan pembangunan gedung MPP saja pada akhir tahun 2021 lalu," ujarnya. Widodo, mengatakan, MPP menjadi salah satu program unggulan pembangunan masuk prioritas Pemkab Sukoharjo tahun 2021 lalu. Pembangunan telah diselesaikan dan tinggal menunggu pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana.

Pemkab Sukoharjo menganggap sangat penting keberadaan MPP sebagai usaha percepatan melayani masyarakat. Karena itu nantinya Mall Pelayanan Publik ditarget bisa segera digunakan. Widodo mengatakan, ada banyak instansi atau lembaga yang akan menempati mal pelayanan. Total ada sekitar 25 in-

stansi akan berkantor memberikan pelayanan pada masyarakat.

"Instansi itu sudah menyatakan kesanggupannya berkantor di MPP nanti. Tujuannya untuk mempercepat pelayanan masyarakat. Mereka seperti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sukoharjo dan instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, Satlantas Polres Sukoharjo dan lainnya," lanjutnya.

Widodo menegaskan, MPP nanti tidak hanya bersifat cepat saja, namun juga akuntabel dan transparan. Sebab masing-masing instansi saling terkait dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu juga mempermudah masyarakat karena berada dalam satu bangunan gedung. (Mam)-f

ALIRAN LISTRIK UNTUK MENJEBAK TIKUS

Berpotensi Sebabkan Hilangnya Nyawa Orang

SEMARANG (KR) - Sering terjadinya kematian akibat tersengat aliran listrik yang dipasang untuk menjebak tikus di sawah mengundang keprihatinan Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi. Kapolda berharap agar kematian sia-sia seperti itu tidak terulang, masyarakat diminta bijak menggunakan izin pemasangan listrik khususnya di persawahan.

"Sudah banyak korban jiwa yang meninggal akibat jebakan listrik di persawahan. Di Sragen, Kudus dan beberapa daerah lain," ungkap Kapolda melalui Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Sabtu (8/1) menanggapi banyaknya korban jiwa akibat tersengat jebakan tikus berlistrik di persawahan.

Menurut Iqbal Alqudusy, kasus terakhir seminggu lalu menimpa Hadi Sukarno (65) warga Patihan Sidoharjo, Sragen meninggal karena jebakan listrik. Dia menjadi korban ke-23 kasus seperti itu

sejak 2020 di Sragen. Kebanyakan kasus seperti itu bermula dari penyalahgunaan izin pemasangan listrik oleh warga. Izin yang semula digunakan untuk pemasangan pompa air persawahan tapi digunakan juga untuk memasang kawat listrik jebakan tikus. "Jatuhnya korban jiwa karena jebakan listrik itu seperti itu patut disayangkan. Pemasangan jaringannya bisa jadi tidak sesuai prosedur keselamatan dan ilegal," tuturnya.

Polda Jateng sudah mengkoordinasikan tentang teknis izin pe-



KR-Karyono

Kombes Pol M Iqbal Alqudusy

masangan listrik di persawahan. Pengajuan izin tersebut, harus melewati beberapa tahap. Antara lain mengurus surat perizinan berusaha berbasis risiko yang dikeluarkan dari Kementerian Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal atas rekomendasi dinas di Pemda. "Untuk pengurusan

izin bisa diperoleh secara online," ucapnya.

Langkah selanjutnya, menurut Iqbal, adalah mendaftarkan ke PLN dengan menyertakan surat pernyataan bahwa listrik akan digunakan sesuai ketentuan.

"Adapun pernyataan yang ditulis adalah untuk menggunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk pompa air guna mengaliri sawah," tandasnya. Namun dalam banyak kasus, warga menggunakan listriknya tidak hanya untuk memompa air, tapi juga untuk memasang jebakan tikus.

Menghilangkan nyawa orang lain seperti itu melanggar pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (Cry)-f

NUSAPUTERA CEGAH PUTUS SEKOLAH

Luncurkan Gerakan Kewirausahaan Urban Farming

SEMARANG (KR) - Pandemi Covid-19 dalam 2 tahun ini menyebabkan banyak orangtua mengalami kesulitan finansial dalam membiayai sekolah anaknya, terutama di sekolah dasar dan menengah. Terkait hal itu, Sekolah Nasional Nusaputera Semarang meluncurkan Gerakan Kewirausahaan Urban Farming untuk mendorong dan membangkitkan ekonomi para orangtua akibat dampak pandemi Covid-19.

Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangkaian perayaan HUT ke-64, nuansa kewirausahaan tampak kentel. Diawali dengan menanam tanaman bunga telang oleh

siswa-siswi TK dan berbagai tanaman sayuran oleh siswa-siswi SD Nusaputera. Ini sekaligus sebagai awal gerakan kewirausahaan Urban Farming di Nusaputera bersama Dinas Pertanian Kota Semarang.

"Tidak hanya pada budi daya bunga telang, Tim dari Dinas Pertanian Kota Semarang terdiri Ana Widaningrum, Sunarti, Nadia Alfia Safitri memberikan pelatihan olahan produk pangan berbasis bunga telang kepada para siswa, guru dan karyawan yang telah terselenggara beberapa waktu sebelumnya," ujar Manajer Pendidikan Sekolah Nusaputera Dra Retno Palupi W MM, Kamis (6/1).



KR-Sugeng Irianto

Tiga siswa SD Nusaputera diapit Tim Dinas Pertanian dan guru saat memamerkan teh bunga telang.

Berbagai produk yg dihasilkan dengan bahan dasar bunga telang disajikan oleh peserta lomba, mulai dari puding, tumpeng, ice cream hingga biskuit. Dari hulu hingga hilir, begitu konsep kewirausahaan yg diusung Nusaputera. Mulai dari urban farming menanam bunga telang yang digawangi oleh jenjang TK dan SD kelas kecil, berlanjut membuat produk kreatif berbasis bunga telang mulai dari jenjang SD kelas besar hingga Perguruan Tinggi.

Selain merintis urban farming, dan mengelola produk berbasis bunga telang sebagai icon Kewirausahaan di Nusaputera, saat ini Nusaputera juga menjalin kerja sama dengan Prodi Sistem Informasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang dalam membangun e-commerce Nusaputera, sebagai media untuk mempromosikan produk yang dihasilkan oleh Nusaputera. Kaprodi Sistem Informasi Unika Soegijapranata Agus Cahyo ST MT mendukung penuh kerja sama dengan Nusaputera. (Sgi)-f

Masakan Daging Kalkun Primadona Baru



KR-Mulyawan

Salah seorang pengunjung sedang menikmati masakan daging kalkun.

BOYOLALI (KR) - Kabupaten Boyolali tidak hanya terkenal sebagai kota susu, tetapi juga terkenal dengan berbagai kuliner yang mempunyai rasa khasnya. Salah satu kuliner yang tidak boleh terlewat jika bertandang ke Boyolali adalah menu olahan daging ayam kalkun, antara lain barbeque kalkun, sup kalkun, snizer kalkun, dan sate kalkun. Sajian yang terbilang unik dan masih jarang kita jumpai ini selain memiliki sensasi rasa tersendiri, daging ayam kalkun diyakini lebih sehat dan aman dikonsumsi untuk segala usia karena rendah kolesterol. Menu kuliner ini hanya bisa didapatkan di sebuah resto yang dulu bekas pabrik makanan tradisional brem yang berada di Dukuh Kebonso, Kelurahan Pulisen, Boyolali.

Kita dulu sebagai peternak ayam kalkun dan berinovasi masakan yang berbahan baku ayam kalkun, kata pemilik resto Moh Yomasaat, saat ditemui, Jumat (7/1). "Untuk mendapatkan cita rasa barbeque sempurna, daging ayam kalkun yang lebih tebal digoreng dua kali, gorengan pertama dengan minyak panas, sedangkan gorengan kedua menggunakan para sambil dilumuri saus khusus dan bumbu rempah lainnya. Cara masak kita paling beda dan menggunakan bumbu khas sehingga tidak ada bau amis," ucapnya. (M-2)-f

160 PEJABAT STRUKTURAL BERALIH FUNGSIONAL

Jaga Profesionalitas, Tunjukkan Kinerja Terbaik

WONOSOBO (KR) - Sebanyak 160 pejabat struktural di Pemkab Wonosobo resmi beralih menjadi pejabat fungsional. Peralihan jabatan tersebut diharapkan tidak multi tafsir dan salah persepsi sehingga menurunkan semangat dan etos kerja. Justru dengan penempatan kerja baru sebagai pegawai fungsional bisa semakin memompa semangat kerja dan tetap menjaga profesionalitas dengan menunjukkan kinerja terbaik.

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk memberikan penjelasan dan pemahaman bagi ASN yang tengah menjalani peralihan dari pejabat struktural

menjadi fungsional dihadiri Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Wakil Bupati Mohamad Albar, Sekda One Andang Wardoyo, dan Kepala BKD Tri Antoro di Pendapa Kabupaten Wonosobo, Jumat (7/1).

Menurut Kepala BKD Wonosobo Tri Antoro, perombakan jabatan ASN di lembaga pemerintah ini sesuai Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Secara garis besar UU tersebut memuat tiga jenis jabatan di lingkup pemerintahan, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Terkait Jabatan Fungsional (JF) di Wonosobo saat ini ada sekitar 3.300 tenaga

pendidik atau guru, 776 tenaga kesehatan, serta 400 fungsional lainnya.

Dengan adanya FGD ini, jelas Tri Antoro, diharapkan jajaran ASN yang disetarakan jabatannya dari struktural ke fungsional tidak timbul multi tafsir dan salah persepsi sehingga menurunkan semangat dan etos kerja. Jadi kegiatan FGD ini perlu kita bangun terus menerus secara terbuka, sehingga tidak muncul gejolak di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Disebutkan, di lingkungan Pemkab Wonosobo ada sekitar 160 pejabat struktural yang beralih menjadi pejabat fungsional sesuai kebi-

jakan pemerintah pusat. Pihaknya berharap semua pegawai dapat menerima dan memahami atas kebijakan ini, sehingga dengan

sistem kerja yang baru tetap mampu bekerja secara profesional dan menunjukkan mutu kinerja terbaiknya. (Art)-f



KR-Ariswanto

Bupati Wonosobo didampingi Wakil Bupati, Sekda, dan Kepala BKD ketika memimpin pemahaman peralihan jabatan struktural ke fungsional dalam FGD.